



Peran Sekolah Lapang Dalam Mendukung Pelaksanaan Standar Kelapa Sawit Berkelanjutan Pada Petani Swadaya Perkumpulan Karya Serumpun

Juliono^{1,3*}, Partini², Marlina³

¹ LSM Karya Serumpun

² Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indonesia

³ Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Indonesia

*Corresponding author: partiniprasetya2@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima: 05/06/2026

Direvisi: 13/07/2026

Diterbitkan: 05/08/2026

Kata Kunci:

ISPO, Media

Pembelajaran, Mixed

Method, RSPO.

Abstrak

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Seiring dengan meningkatnya tuntutan global terhadap praktik perkebunan berkelanjutan, petani kelapa sawit swadaya dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memenuhi standar keberlanjutan. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk memperkuat kapasitas petani adalah melalui penyelenggaraan sekolah lapang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah lapang dalam mendukung penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan pada perkumpulan petani Karya Serumpun. Penelitian menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*), dilakukan terhadap perkumpulan petani Karya Serumpun. Jumlah sampel penelitian terdiri atas 30 orang responden. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah lapang memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani mengenai praktik budidaya kelapa sawit yang baik, pengelolaan lingkungan, penggunaan sarana produksi secara tepat, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Program ini juga meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan dalam pengelolaan usaha tani mereka. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan tingkat pemahaman peserta dan keterbatasan waktu kegiatan, sekolah lapang dinilai efektif sebagai media pembelajaran bagi petani.

Abstract

Palm oil is a strategic plantation commodity that contributes substantially to Indonesia's economy. However, increasing global demands for sustainable palm oil production have intensified the challenges faced by independent smallholders in complying with sustainability standards, particularly in adopting environmentally sound cultivation practices and meeting certification requirements. Field schools (sekolah lapang) have emerged as a participatory extension approach to strengthen farmers' knowledge and technical capacity in addressing these challenges. This study examines the role of field schools in supporting the implementation of sustainable palm oil standards among members of the Karya Serumpun Farmer Association. A mixed-methods approach was employed, involving 30 independent smallholders selected as research respondents. Data were collected through structured interviews, in-depth interviews, and document analysis, and subsequently analyzed using quantitative descriptive and qualitative techniques. The findings demonstrate that field schools significantly improved farmers' knowledge and skills in good agricultural practices, environmental management, the appropriate use of agricultural inputs, and the principles of sustainable palm oil production. The program also enhanced farmers' awareness of the importance of integrating sustainability standards into farm management practices. Despite implementation challenges, including

variations in participants' educational backgrounds and limited time available for training activities, the field school proved to be an effective extension and capacity-building mechanism for promoting the adoption of sustainable palm oil standards among independent smallholders.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, di mana subsektor perkebunan kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) sebagai komoditas unggulan yang mendominasi pasar global. Keberadaan industri sawit tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga berperan krusial dalam menciptakan lapangan kerja bagi jutaan petani dan buruh perkebunan (Anggraini et al., 2022). Namun, pesatnya pertumbuhan industri ini diiringi oleh berbagai tantangan serius yang merusak reputasi sawit di pasar internasional. Isu-isu lingkungan seperti deforestasi (Leonanda, 2019) dan alih fungsi lahan gambut menjadi lahan kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran hutan (WALHI, 2016). Tidak hanya aspek ekologis, industri sawit juga kerap dituding melakukan praktik pelanggaran hak asasi manusia, termasuk eksploitasi pekerja perempuan dan keterlibatan anak di bawah umur dalam proses produksi (Atem, 2017). Kondisi ini menciptakan paradoks di mana keberhasilan ekonomi berbenturan dengan degradasi kualitas lingkungan dan sosial.

Tekanan global dari konsumen, khususnya di Uni Eropa, menuntut adanya bukti nyata bahwa produk kelapa sawit dihasilkan melalui proses yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Standar *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) kemudian hadir sebagai instrumen sertifikasi sukarela internasional yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif budidaya sawit terhadap alam dan masyarakat sekitar (RSPO, 2019b).

Tantangan terbesar dalam implementasi sawit berkelanjutan di Indonesia terletak pada petani kelapa sawit swadaya (*smallholders*). Berbeda dengan perusahaan besar, petani swadaya umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi teknis, modal, dan teknologi budidaya yang ramah lingkungan. Wibawa (2013) menyatakan aplikasi herbisida tidak terkontrol tidak hanya mengontrol gulma target utama, namun berdampak buruk bagi ekologi, karena meninggalkan residu dalam tanah. Lebih lanjut, aplikasi herbisida berbahan parakuat, glifosat dan ammonium glufosinate di perkebunan kelapa sawit berpengaruh buruk pada lingkungan (tanah, air dan udara) serta menyasar organisme lain yang tidak menjadi target.

Hal tersebut sejalan dengan kondisi kebun kelapa sawit petani dengan kondisi kurang baik meliputi; 1) bibit kelapa sawit tidak bersertifikat; 2) Perawatan kurang intensif (pemupukan, pruning, piringan); 3) sebagian besar petani belum mempunyai asuransi kecelakaan kerja dan; 4) masih melakukan praktik blanked (semprot total) pada kebun kelapa sawit (Perkumpulan Karya Serumpun, 2024). Penelitian Nurjanah et al., (2022); Theresia, (2024) juga menemukan hal senada bahwa petani kelapa sawit swadaya belum melakukan praktik pertanian secara baik dalam segi pemupukan, perawatan, penggunaan bibit dan hasil panen yang rendah.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah merumuskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Sekolah lapang yang diinisiasi oleh Perkumpulan Karya Serumpun muncul sebagai model intervensi pendidikan non-formal untuk mengatasi keterbatasan petani swadaya. Melalui pendekatan partisipatif, sekolah lapang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan secara langsung di lahan perkebunan, sehingga petani dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi secara mandiri. Kementerian Kehutanan (2012) menjelaskan bahwa sekolah lapang adalah sekolah informal dengan pendekatan androgogi atau orang dewasa yang dilakukan dengan cara praktik langsung di lapangan dan mendorong keaktifan peserta dengan dipandu oleh fasilitator belajar. Strategi ini selaras dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Ansell

& Gash, 2007). Perkumpulan petani Karya Serumpun melakukan kolaborasi multi pihak dengan pemerintah, swasta, NGO nasional dalam melaksanakan sekolah lapang. Istilah sekolah lapang pertama kali digunakan dalam Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yang selanjutnya dikenal dengan pendekatan sekolah lapangan yang dikembangkan mulai tahun 1989 oleh Petugas Departemen Pertanian yang dilatih menjadi pemandu lapangan, bekerja sama dengan tim bantuan teknis dari FAO, dalam rangka Program Nasional SL PHT (Napitupulu, 2022).

Menurut Bakker et al., (2022) sekolah lapang merupakan pendekatan pendidikan non-formal yang berfokus pada metode "belajar sambil melakukan" melalui pengamatan langsung di lapangan. Program ini dirancang sebagai *platform* bagi komunitas tani untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan guna meningkatkan praktik pertanian mereka menuju produksi yang lebih berkelanjutan. Dengan menggabungkan aspek ekologi dan penemuan mandiri, petani diberdayakan untuk menguji teknologi baru secara kolektif dan mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kondisi lahan mereka. Tujuan utama dari sekolah lapang adalah mengubah petani menjadi ahli di lahan mereka sendiri melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Sebagai "sekolah tanpa dinding", program ini tidak hanya meningkatkan sisi profitabilitas pertanian, tetapi juga memperkuat kapasitas organisasi komunitas petani. Pada akhirnya, sekolah lapang dipandang sebagai sebuah proses pengembangan diri yang berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian dalam menghadapi tantangan pertanian, bukan sekadar target hasil akhir yang statis (Lucia, 2006).

Implementasi sekolah lapang pada perkumpulan petani kelapa sawit swadaya Karya Serumpun sudah dilaksanakan sejak Tahun 2020. Metode sekolah lapang dilakukan sebagai pendekatan pembelajaran bagi calon petani komitmen. Hal ini dilakukan karena sebagian besar petani merupakan orang dewasa dengan pendidikan beragam. Pendekatan sekolah lapang menekankan pendekatan berbasis pengalaman, diskusi dan praktik langsung terkait pertanian keberlanjutan. Proses pelaksanaannya di dampingi oleh satu fasilitator lokal yang memandu 20 sampai 30 peserta. Dari permasalahan tersebut maka sekolah lapang dianggap strategi yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan petani kelapa sawit swadaya. Sekolah lapang ini dirancang secara sistematis melalui empat fase operasional yang terukur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah lapang dalam meningkatkan pengetahuan petani dan perannya dalam mendukung penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan, serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan pada perkumpulan petani kelapa sawit Karya Serumpun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada kelompok petani yang telah melaksanakan program sekolah lapang secara terstruktur. Penelitian dilakukan terhadap anggota Perkumpulan Karya Serumpun Kabupaten Indragiri Hulu yang tersebar pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Seberida dan Batang Gangsal. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu mulai bulan Maret hingga Juni 2026. Sampel penelitian ini berjumlah 33 responden yang merupakan petani kelapa sawit swadaya anggota perkumpulan Karya Serumpun. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu: (1) petani kelapa sawit swadaya yang tergabung dalam Perkumpulan Karya Serumpun; (2) telah mengikuti kegiatan Sekolah Lapang; (3) masih aktif melakukan kegiatan usaha tani kelapa sawit.

Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu penelitian yang menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif (Sugiyono, 2017), (Creswell & Clark, 2011). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi langsung dan *Focus Group discussion (FGD)*. Data sekunder diperoleh melalui jurnal, dan sumber lain yang diambil dari pihak kedua.

Analisis peningkatan pengetahuan petani

Perubahan pengetahuan dan pemahaman petani dilakukan dengan cara membandingkan persentase nilai sebelum pelaksanaan sekolah lapang (*pre test*) dan sesudah sekolah lapang (*post test*). Persentase perubahan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase tingkat pemahaman

f = Jumlah responden yang menjawab benar

n = Jumlah total responden

Analisis perubahan perilaku budidaya

Untuk mengetahui perubahan praktik budidaya dilakukan dengan membandingkan praktik budidaya yang dilakukan petani sebelum dan setelah pelaksanaan sekolah lapang. Data perubahan praktik budidaya dikumpulkan melalui gabungan wawancara terstruktur dan observasi langsung di lapangan beberapa bulan pasca sekolah lapang. Wawancara menggunakan daftar pernyataan standar untuk mengetahui apakah petani sudah menerapkan praktik budidaya tertentu, dilakukan sebelum dan sesudah sekolah lapang. Jawaban petani kemudian diverifikasi melalui observasi langsung di lahan untuk memastikan kesesuaian penerapan di lapangan. Seluruh data dihitung persentasenya menggunakan rumus sehingga dapat diketahui seberapa besar perubahan persentase petani yang menerapkan praktik budidaya yang baik sebelum dan sesudah mengikuti program. Persentase perubahan tersebut dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase perubahan perilaku budidaya

f = Jumlah responden yang menerapkan praktik

n = Jumlah total responden

Untuk mengetahui kontribusi sekolah lapang dalam mendukung praktek pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan dan kendala yang dihadapi, dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Tahapan analisis kualitatif yang digunakan mengacu pada Miles et al, (2016) yang terdiri dari tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut berlangsung secara simultan dan iteratif, ketika penarikan kesimpulan masih terdapat data yang kurang maka peneliti dapat kembali ke tahapan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia dan tingkat pendidikan. Karakteristik tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan demografi petani yang menjadi responden penelitian.

Tabel 1. Karakteristik responden

No	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase(%)
	Usia		
1.	31–40	7	21,20
2.	41–50	11	33,30
3.	51–60	12	36,40

4.	> 60	3	9,10
	Jumlah	33	100,00
	Pendidikan		
1.	SD	13	39,4
2.	SMP/SLTP	12	36,4
3.	SMA/SLTA	8	24,2
	Jumlah	33	100,00

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, sebagian besar responden berada pada kelompok usia di atas 40 tahun yaitu sebesar 69,7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani responden memiliki pengalaman dalam mengelola usaha tani kelapa sawit. Namun, perbedaan usia dapat memengaruhi proses penerimaan informasi dan inovasi. Oleh karena itu, metode Sekolah Lapang yang menggunakan pendekatan praktik langsung dan pembelajaran berbasis pengalaman menjadi penting agar materi dapat diterima oleh petani dengan berbagai kelompok usia (Ja'afar et al, 2024).

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan dasar hingga menengah pertama sebesar 75,8%. Tingkat pendidikan dapat memengaruhi kemampuan petani dalam memahami informasi teknis, namun keterbatasan pendidikan formal dapat diatasi melalui metode Sekolah Lapang yang bersifat partisipatif, praktik langsung, dan mudah diterapkan. Pendekatan tersebut membantu petani memahami penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan sesuai kondisi kebun mereka (Sofia et al., 2022).

Pelaksanaan Sekolah Lapang

Pelaksanaan sekolah lapang berlangsung melalui beberapa tahapan, yaitu penyampaian materi, praktik lapangan, diskusi kelompok, dan evaluasi. Metode yang digunakan menekankan pada belajar melalui pengalaman langsung agar peserta dapat memahami materi secara aplikatif. Materi yang disampaikan meliputi aspek teknis budidaya, pengelolaan lingkungan, serta pemahaman terhadap standar keberlanjutan. Materi yang disampaikan disusun secara bertahap mulai dari hal yang paling mendasar hingga praktik langsung di lahan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi Sekolah Lapang dan Tujuan Pembelajaran

No	Materi Sekolah Lapang	Tujuan Pembelajaran
1	Praktik Budidaya Kelapa Sawit yang Baik	Meningkatkan pemahaman petani mengenai teknik budidaya yang sesuai rekomendasi
2	Pemupukan Berimbang	Meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk dan produktivitas tanaman
3	Pengendalian Hama dan Penyakit	Mengurangi risiko kerusakan tanaman dan kehilangan hasil
4	Pengelolaan Lingkungan	Meningkatkan kesadaran petani terhadap praktik ramah lingkungan
5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Mengurangi risiko kecelakaan kerja di perkebunan
6	Pencatatan Usaha Tani	Meningkatkan kemampuan administrasi dan dokumentasi kegiatan usaha tani
7	Pengenalan Standar ISPO dan RSPO	Memahami persyaratan dan manfaat standard keberlanjutan

Sumber: Data primer diolah (2026)

Metode sekolah lapang yang digunakan adalah pengamatan langsung di lahan, demonstrasi, percobaan sederhana, diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan ke kebun percontohan. Hal ini berbeda dengan penyuluhan biasa yang hanya berupa ceramah di dalam ruangan.

Analisis Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Petani

Salah satu indikator keberhasilan sekolah lapang adalah terjadinya peningkatan pengetahuan peserta. Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* serta wawancara mendalam, diperoleh data perbandingan tingkat pemahaman disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Tingkat Pemahaman Sebelum dan Sesudah Sekolah Lapang

No	Aspek Pengetahuan	Sebelum SL	Sesudah Mengikuti SL	Peningkatan
1	Standar ISPO	18,20%	87,90%	69,70%
2	Standar RSPO	10,20%	72,70%	62,50%
3	Pemupukan Berimbang	24,20%	84,80%	60,60%
4	Pengendalian Hama Terpadu	15,20%	78,80%	63,60%
5	Pengelolaan Lingkungan	21,20%	81,80%	60,60%
6	Pencatatan Usaha Tani	9,10%	69,70%	60,60%
	Rata-rata	16,40%	79,40%	63,00%

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 3, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman petani sebesar 63,0% setelah mengikuti kegiatan sekolah lapang. Peningkatan tersebut terjadi karena metode pembelajaran yang diterapkan dalam sekolah lapang tidak hanya memberikan materi secara teori, tetapi juga melibatkan petani secara langsung melalui praktik lapangan, diskusi kelompok, dan proses pengamatan terhadap kondisi kebun. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman tersebut membuat petani lebih mudah memahami materi karena informasi yang diberikan berkaitan langsung dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam kegiatan usaha tani. Selain itu, adanya pendampingan fasilitator selama proses Sekolah Lapang membantu petani dalam menerapkan pengetahuan baru, seperti praktik pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, pengelolaan lingkungan, serta pemahaman terhadap standar kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Bakker et al. (2022) yang menyatakan bahwa sekolah lapang merupakan pendekatan pendidikan non-formal yang efektif dalam meningkatkan kapasitas petani melalui kegiatan belajar sambil melakukan, pengamatan, dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan Tabel 3, penilaian pemahaman petani terhadap standar budidaya kelapa sawit berkelanjutan mencakup enam aspek utama, yaitu pemahaman terhadap standar ISPO, standar RSPO, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, pengelolaan lingkungan, dan pencatatan usaha tani.

1. Pemahaman Terhadap Standar ISPO

Sebelum mengikuti sekolah lapang, persentase petani yang memahami Standar ISPO hanya mencapai 18,20% atau setara dengan 6 orang dari total 33 responden. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum mengenal standar wajib nasional yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Pemahaman yang rendah ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pendampingan yang diterima petani sebelumnya. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 87,90% atau 29 orang petani. Hal ini mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan berhasil dipahami dengan baik. Peningkatan ini cukup tinggi karena ISPO merupakan standar yang bersifat wajib, sehingga penjelasan mengenai kewajiban dan manfaatnya bagi petani disampaikan secara mendalam dan mudah dipahami.

2. Pemahaman terhadap standar RSPO

Sebelum kegiatan, pemahaman petani terhadap Standar RSPO hanya mencapai 10,20% atau 3 orang petani. Persentase yang lebih rendah dibandingkan ISPO disebabkan karena RSPO merupakan standar internasional yang bersifat sukarela, sehingga informasi

mengenai standar ini jarang sampai ke tingkat petani kecil. Selain itu, persyaratan yang tercantum dalam RSPO dianggap lebih kompleks dan jarang menjadi topik pembahasan di lingkungan petani. Setelah mengikuti Sekolah Lapang, persentase pemahaman meningkat menjadi 72,70% atau 24 orang petani. Meskipun peningkatannya cukup besar, persentase akhirnya masih berada di bawah pemahaman terhadap ISPO. Hal ini wajar mengingat sifat standar ini yang tidak diwajibkan secara nasional, serta persyaratannya yang lebih rinci dan ketat, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat dipahami sepenuhnya oleh petani.

3. Pemahaman tentang pemupukan berimbang

Sebelum mengikuti sekolah lapang, hanya 24,20% atau 8 orang petani yang memahami konsep pemupukan berimbang. Sebagian besar petani selama ini menerapkan pemupukan berdasarkan kebiasaan atau anjuran pedagang pupuk, tanpa mempertimbangkan kebutuhan hara tanaman dan kondisi tanah. Akibatnya, penggunaan pupuk seringkali tidak tepat baik dari segi jenis, dosis, maupun waktu pemberiannya. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai manfaat dan cara pelaksanaannya, persentase pemahaman melonjak menjadi 84,80% atau 28 orang petani. Peningkatan yang cukup tinggi ini disebabkan karena aspek ini berkaitan langsung dengan efisiensi biaya dan peningkatan hasil panen, sehingga petani merasa memiliki kepentingan yang besar untuk memahaminya dengan baik.

4. Pemahaman tentang pengendalian hama terpadu

Sebelum mengikuti kegiatan, tingkat pemahaman petani terhadap pengendalian hama terpadu hanya 15,20% atau 5 orang petani. Selama ini, cara yang umum dilakukan adalah penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, baik bagi tanaman, tanah, maupun kesehatan manusia. Setelah pembelajaran, pemahaman petani meningkat menjadi 78,80% atau 26 orang petani. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan mengenai prinsip pengendalian hama yang ramah lingkungan dan penggunaan pestisida secara bijak dapat diterima dengan baik. Petani mulai memahami bahwa pengendalian hama tidak harus selalu mengandalkan bahan kimia, melainkan dapat dikombinasikan dengan cara lain yang lebih aman dan berkelanjutan.

5. Pemahaman tentang pengelolaan lingkungan

Sebelumnya, pemahaman petani mengenai pengelolaan lingkungan yang baik baru mencapai 21,20% atau 7 orang petani. Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, seperti menjaga daerah sempadan sungai, melindungi sumber air, dan mengelola limbah kebun, masih sangat rendah karena dianggap kurang berpengaruh langsung terhadap hasil panen. Setelah mengikuti Sekolah Lapang, persentase pemahaman meningkat menjadi 81,80% atau 27 orang petani. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penjelasan mengenai hubungan antara pengelolaan lingkungan yang baik dengan kesuburan tanah dan kualitas hasil panen berhasil membuka wawasan petani. Mereka mulai memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian penting dalam menjamin keberlanjutan usaha tani dalam jangka panjang.

6. Pemahaman tentang pencatatan usaha tani

Aspek pencatatan usaha tani merupakan aspek yang paling sedikit dipahami petani sebelum kegiatan, yaitu hanya 9,10% atau 3 orang petani. Sebagian besar petani beranggapan bahwa pencatatan tidak diperlukan karena usahanya berskala kecil, atau merasa kesulitan dalam hal pencatatan karena keterbatasan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Setelah diberikan pelatihan pencatatan sederhana yang mudah dipraktikkan, pemahaman petani meningkat menjadi 69,70% atau 23 orang petani. Meskipun mengalami

peningkatan yang cukup signifikan, persentase ini masih menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administrasi dan pencatatan memerlukan pembiasaan yang lebih lama dan pendampingan berkelanjutan agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh petani.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pemahaman petani terhadap seluruh aspek standar kelapa sawit berkelanjutan sebelum mengikuti Sekolah Lapang adalah 16,40%, yang dikategorikan dalam tingkat pemahaman rendah. Setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, rata-rata pemahaman meningkat menjadi 79,40%, yang menunjukkan bahwa secara umum petani telah memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai standar kelapa sawit berkelanjutan. Peningkatan ini membuktikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan efektif dalam meningkatkan pengetahuan petani, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Perubahan Perilaku Budidaya

Peningkatan pengetahuan juga diikuti dengan perubahan perilaku nyata dalam pengelolaan kebun. Perubahan praktik budidaya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perubahan Praktik Budidaya Petani

No	Praktik Budidaya	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Perubahan
1	Membakar Lahan untuk membersihkan gulma	84,80%	9.1%	Turun 75.7%
2	Menggunakan pupuk secara berlebihan	78,80%	27.3%	Turun 51.5%
3	Membuat pupuk organik dari limbah kebun	0,00%	72.7%	Naik 72.7%
4	Menggunakan pestisida kimia tanpa perhitungan	87,90%	30.3%	Turun 57.6%
5	Menjaga jarak tanam dari sumber air/sungai	12,10%	75.8%	Naik 63.7%
6	Melakukan pencatatan hasil panen dan biaya	6,10%	66.7%	Naik 60.6%

Sumber : Data primer diolah (2026)

Perhitungan persentase pada tabel ini menunjukkan proporsi petani yang benar-benar menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam kegiatan sehari-hari di kebun yang mana dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Sebelum sekolah lapang, sebanyak 84,80% (28 orang petani) masih melakukan pembakaran lahan. Setelah mengikuti sekolah lapang, persentase menurun drastis menjadi 9,10% atau hanya 3 orang petani yang masih melakukannya. Penurunan ini menunjukkan bahwa petani telah memahami dampak negatif pembakaran terhadap lingkungan dan hukum, serta beralih ke cara pembersihan lahan yang lebih aman.
2. Sebelum sekolah lapang, sebanyak 78,80% (26 orang petani) menggunakan pupuk secara berlebihan. Setelah pembelajaran, persentase menurun menjadi 27,30% atau sekitar 9 orang petani. Penurunan ini menunjukkan bahwa petani mulai memahami cara menghemat biaya dan menjaga kesuburan tanah tanpa harus memberikan pupuk secara berlebihan.
3. Sebelum sekolah lapang, tidak ada satupun petani yang membuat pupuk organik dari limbah kebun, sehingga persentasenya adalah 0%. Setelah mengikuti kegiatan, persentase meningkat menjadi 72,70% (24 orang petani). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang bermanfaat secara ekonomi dan mudah diterapkan langsung mendapat respon yang sangat baik dari petani.
4. Sebelum sekolah lapang, sebanyak 87,90% (29 orang petani) menggunakan pestisida tanpa perhitungan yang tepat. Setelah pembelajaran, persentase menurun menjadi 30,30% atau sekitar 10 orang petani. Penurunan ini menunjukkan bahwa petani mulai memahami bahaya

bahan kimia bagi kesehatan dan lingkungan, serta mulai menerapkan cara pengendalian hama yang lebih bijak.

5. Sebelum sekolah lapang, hanya 12,10% (4 orang petani) yang menjaga jarak tanam dari sungai. Setelah mengikuti sekolah lapang, persentase meningkat menjadi 75,80% (25 orang petani). Hal ini menunjukkan bahwa petani mulai memahami pentingnya menjaga kualitas air dan memenuhi persyaratan standar keberlanjutan.
6. Sebelum sekolah lapang, hanya 6,10% (2 orang petani) yang melakukan pencatatan. Setelah pembelajaran, persentase meningkat menjadi 66,70% atau setara dengan 22 orang petani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dianggap sulit, sebagian besar petani sudah mulai berusaha menerapkan administrasi sederhana untuk mengetahui kondisi.

Peningkatan penerapan praktik seperti penggunaan pupuk secara tepat, pengelolaan limbah kebun, pengurangan penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai, serta pencatatan usaha tani menunjukkan bahwa sekolah lapang berperan dalam meningkatkan kapasitas petani dalam mengambil keputusan pengelolaan kebun. Hal ini sejalan dengan Taquiuddin (2025), yang menjelaskan bahwa metode pembelajaran berbasis pengalaman mampu mendorong petani untuk menerapkan inovasi pertanian secara lebih efektif. Selain itu, penerapan praktik budidaya yang memperhatikan aspek lingkungan juga sesuai dengan konsep pertanian berkelanjutan, dimana pengelolaan kebun tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya (Kospa, 2016)

Peran sekolah lapang dalam mendukung standar kelapa sawit berkelanjutan

Sekolah lapang berperan penting dalam mendukung penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan melalui berbagai aspek. Hasil analisis peran sekolah lapang dalam mendukung standar kelapa sawit berkelanjutan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Sekolah Lapang Terhadap Aspek Berkelanjutan

No	Aspek	Kontribusi Sekolah Lapang
1	Lingkungan	Meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan limbah, penggunaan pupuk tepat dan perlindungan alam
2	Ekonomi	Meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas tanaman
3	Sosial	- Meningkatkan kesadaran keselamatan kerja dan tanggung jawab sosial - Meningkatkan kapasitas petani berupa pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengambilan keputusan
4	Kelembagaan	Mendorong legalitas dan administrasi melalui pencatatan dan persyaratan sertifikasi

Sumber: Data primer diolah (2026)

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sekolah lapang memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran petani terhadap pentingnya keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Andini, 2024). Sekolah lapang juga membantu petani memahami perbedaan dan persamaan antara ISPO dan RSPO, sehingga mereka dapat membedakan mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi peluang pengembangan usaha.

Kendala yang dihadapi petani dalam penerapan standar kelapa sawit berkelanjutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani responden yang telah mengikuti kegiatan sekolah lapang, diperoleh beberapa kendala yang dihadapi petani dalam menerapkan standar kelapa sawit berkelanjutan. Kendala-kendala tersebut meliputi aspek ekonomi, teknis, kebiasaan budidaya, serta keterbatasan informasi terkait penerapan standar keberlanjutan. Hasil identifikasi kendala tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kendala yang dihadapi Petani

No	Jenis Kendala	Persentase
1	Keterbatasan modal untuk perbaikan lahan	84.8%
2	Belum ada pembeli yang memberikan harga lebih tinggi	78.8%
3	Kebiasaan lama yang sulit diubah	63.6%
4	Keterbatasan waktu untuk mengikuti pendampingan lanjutan	54.5%
5	Kurangnya informasi tentang prosedur sertifikasi	48.5%

Sumber: Data Primer diolah (2026)

Kendala utama yang paling terasa adalah aspek ekonomi. Meskipun petani sudah memahami manfaat RSPO, mereka masih ragu untuk menerapkannya secara penuh karena membutuhkan biaya tambahan dan belum ada jaminan harga jual yang lebih tinggi. Sebanyak 78,8% (26 orang) menyatakan hal ini sebagai kendala utama. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum merasakan manfaat ekonomi langsung dari menerapkan praktik budidaya berkelanjutan. Selama ini harga tandan buah segar (TBS) yang diterima masih sama dengan harga umum, padahal petani telah mengeluarkan biaya dan tenaga lebih untuk memenuhi standar. Ketidakadaan insentif harga yang lebih tinggi ini membuat motivasi petani menjadi kurang maksimal, karena mereka menganggap usaha yang dilakukan belum memberikan keuntungan tambahan yang sebanding.

Faktor kebiasaan lama yang sulit diubah sebesar 63,60%, (21 orang petani) juga menjadi kendala dalam penerapan praktik keberlanjutan. Hasil ini menggambarkan bahwa pola pikir dan cara bertani yang telah diwariskan atau dilakukan selama puluhan tahun tidak dapat berubah dalam waktu singkat. Misalnya, kebiasaan menggunakan pupuk dan pestisida secara bebas atau membersihkan lahan dengan cara dibakar masih terasa lebih mudah dan cepat bagi petani. Perubahan perilaku memerlukan proses adaptasi yang bertahap, sehingga kendala ini dianggap wajar dan membutuhkan pendampingan yang terus-menerus agar kebiasaan baru dapat terbentuk dengan baik.

Sementara itu sebanyak 54,50% atau 18 orang petani menyatakan bahwa keterbatasan waktu untuk mengikuti pendampingan. Hal ini dikarenakan petani memiliki kesibukan yang padat mengurus kebun, pekerjaan sampingan, maupun kebutuhan keluarga sehari-hari. Akibatnya, mereka sulit meluangkan waktu secara khusus untuk mengikuti pelatihan tambahan, mengurus administrasi, atau menerapkan metode baru yang memerlukan perhatian lebih. Kendala ini berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi petani yang harus membagi waktu untuk memastikan kebutuhan hidup terpenuhi. Berikutnya ada sebanyak 16 petani yang masih kurang mendapatkan informasi mengenai sertifikasi dengan persentase sebesar 48,50%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun petani sudah memahami pentingnya standar berkelanjutan, pengetahuan mereka mengenai prosedur, syarat, biaya, hingga manfaat nyata dari proses sertifikasi masih terbatas. Informasi yang kurang jelas membuat petani ragu untuk memulai langkah menuju sertifikasi, karena mereka khawatir akan kesulitan administrasi, biaya yang besar, atau tidak memahami bagaimana cara mendapatkan akses pasar yang lebih baik setelah tersertifikasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekolah lapang berperan penting dalam memperkuat kapasitas pengetahuan petani tentang standar ISPO, standar RSPO, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, pengelolaan lingkungan, dan pencatatan usaha tani, namun untuk aspek administrasi usaha tani masih memerlukan pendampingan yang lebih intensif agar dapat diterapkan secara optimal.
2. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa sekolah lapang tidak hanya meningkatkan pengetahuan petani, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan adopsi praktik budidaya yang lebih ramah lingkungan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip

keberlanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya praktik pembakaran lahan, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan, serta meningkatnya penerapan pembuatan pupuk organik, perlindungan kawasan sempadan sungai, dan pencatatan usaha tani.

3. Penerapan standar RSPO oleh petani kelapa sawit swadaya masih menghadapi berbagai kendala, dengan faktor ekonomi sebagai hambatan utama akibat belum adanya insentif harga yang sebanding dengan biaya dan upaya penerapan praktik berkelanjutan. Selain itu, kebiasaan budidaya konvensional yang sulit diubah, keterbatasan waktu untuk mengikuti pendampingan, serta terbatasnya informasi mengenai proses sertifikasi turut menghambat adopsi standar RSPO

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, E. N. L. ... Riadi, R. (2022). Analisis dan Potensi Komoditi Unggulan Perkebunan Provinsi Riau. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11067–11066.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asosiasi Karya Serumpun. (2024). Buku Laporan Tahunan Karya Serumpun.
- Atem, A. (2017). Fenomena Pekerja Anak Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Raheema*, 4, 137–147. <https://doi.org/10.24260/raheema.v4i2.842>
- Bakker, T. ... Poisot, A.-S. (2022). How can the farmer field school approach be used to support agroecological transitions in family farming in the Global South? Recommendations for farmer field school facilitators, agricultural development project designers and managers. <https://doi.org/10.4060/cb9920en>
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publication.
- Ja'afar, J., Suandi, S., & Rosyani, R. (2024). Persepsi Petani Terhadap Faktor Internal dan Eksternal Petani Di Dalam Sistem Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Model Tumbang Serempak Berkelanjutan Di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 7(1), 10–23. <https://doi.org/10.22437/jpb.v7i1.34571>
- Kospa, H. S. D. (2016). Konsep Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*, 5(1). <https://doi.org/10.36982/jtg.v5i1.223>
- Kementerian Kehutanan. (2012). *Sekolah Lapang*. Kementerian Kehutanan.
- Kospa, H. S. D. (2016). Konsep perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Tekno Global*, 5(1). <https://doi.org/10.36982/jtg.v5i1.223>
- Leonanda, B. D. (2019). Masalah Lingkungan, Pemanasan Global, dan Masa Depan Industri Kelapa Sawit Indonesia. *Buletin Profesi Insinyur*, 2(3), 102–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.20527/bpi.v2i3.50>
- Lucia, St. (2006). *Farmer Field School (FFS) Manual Special Framework of Assistance (SFA)*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Miles, M. ... Huberman. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (Third edit). Sage Publications.
- Napitupulu, R. (2022). Analisa Peningkatan Pengetahuan Kelompok Wanita Tani Melalui Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (Sl Gap) Tanaman Sayuran dalam Polybag, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan. *Prosiding Seminar Nasional*.
- Nurjanah, D. ... Anwar, M. F. (2022). Kinerja Petani Swadaya Kelapa Sawit Di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. *AGRITECH*, 24(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30595/agritech.v24i2.14117>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pemerintah Republik Indonesia.
- RSPO. (2019a). Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil. Roundtable on Sustainable Palm Oil.
- RSPO. (2019b). RSPO Independent Smallholder Standard. RSPO.
- Sofia, S., Suryaningrum, F. L., & Subekti, S. (2022). Peran Penyuluh pada Proses Adopsi Inovasi Petani dalam Menunjang Pembangunan Pertanian. *Agribios*, 20(1), 151–160. <https://doi.org/10.36841/agribios.v20i1.1865>.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods). Alfabeta.
- Taqiuddin, M., Yanuartati, B. Y. E., & Nursalim, I. (2025). Pendampingan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim melalui Sekolah Lapang bagi Petani Lahan Kering di Desa Segala Anyar, Pujut, Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 8(2), 625–631. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v8i2.12010>
- Theresia, M. (2024). Pengaruh Faktor Sosial dan Ekonomi Terhadap Produktivitas Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. Pengaruh Faktor Sosial Dan Ekonomi Terhadap Produktivitas Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2016). Kelola Rakyat atas Ekosistem Rawa Gambut: Pelajaran Ragam Potret dan Argumen Tanding.
- Wibawa, W. (2013). Development of method for residue analysis of three herbicides in the soil by high performance liquid chromatography (HPLC). *Academic Journals*, 5(8). <https://doi.org/https://doi.org/10.5897/JECE2013.0285>